

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan menuju tujuan pembangunan nasional.¹

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materil dan spiritual berlandaskan Pancasila dan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar dan tujuan serta pedoman pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dilaksanakan merata dan mencakup semua aspek, di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, termasuk pembangunan daerah yang mana hasil-hasil pembangunan tersebut harus dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang berupa kesejahteraan rakyat.

Pada dasarnya antara manusia dan lingkungan adalah satu bangunan yang berdiri saling menguatkan, dimana manusia itu tergantung dengan lingkungan begitu pula sebaliknya, lingkungan itu tergantung dengan aktivitas kegiatan manusia. Namun bila dari sisi manusia, maka lingkungan amat tergantung dengan aktivitas kegiatan manusia memanfaatkannya.

Problem lingkungan semakin dirasakan oleh umat manusia. Gejala umum yang menonjol adalah kerusakan berbagai ekosistem atau hilangnya berbagai spesies flora dan fauna, pencemaran air, tanah dan udara, serta dampak lainnya. Bahkan masalah lingkungan ini berkembang lebih lanjut tidak hanya mencakup aspek ekologi tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum hingga solusinya juga secara komprehensif dan keterlibatan banyak pihak dan kelembagaan.

Di era Reformasi telah terjadinya transformasi dari kekuasaan pemerintahan secara sentralistik menuju pemerintahan yang baik dengan berlakunya desentralisasi, yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Perubahan ini memiliki potensi saling ketergantungan antar berbagai aspek kehidupan yaitu, politik, sosial ekonomi dan budaya, serta lingkungan yang perlu diantisipasi secara seksama dan holistik.

Pada konteks otonomi daerah, dimana penyelenggara pemerintahan daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka jelas bahwa masyarakat di daerah memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu

menunjang upaya kelestarian lingkungan dan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu agenda pembangunan. Berbagai cara dilakukan dan kebijakan dibuat agar tetap berada pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi baik melalui pemanfaatan sumber daya alam, intensifikasi penggunaan lahan maupun industrialisasi memungkinkan timbulnya dampak terhadap lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus ditebus dengan rusaknya sumber daya alam, apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara yang selama ini penopang laju pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari sumber daya alam khususnya tambang batu bara, timah, emas dan bahan galian golongan C seperti kuarsa dan kaolin.

Sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hakekatnya merupakan upaya pengembangan sumberdaya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan masyarakat juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Penambangan yang dilakukan terkadang merusak lingkungan. Contohnya saja aliran limbah yang dibuang sembarangan. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kukar Meninjau aliran limbah di lokasi tambang PT.

Jember, M. B. (B.M) dan PT. Kutai Utara Utama Coal (KUBUC)

Tenggarong Seberang. Tinjauan dilakukan sebagai langkah untuk menyikapi pengaduan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait Pencemaran Sungai yang di duga berasal dari limbah penambangan kedua perusahaan itu. Anggota Dewan di pimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kukar Baharuddin Demu, Rombongan Anggota Komisi I DPRD Kukar yang terdiri dari Firnadi Ikhsan, Isnaini dan Hayansyah. Wakil DPRD Kukar Baharuddin Demu dan Anggota Komisi I Mengingatkan agar perusahaan memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya termasuk pengelolaan air limbah di lokasi tambang sehingga tidak tercemar dan di manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.²

Munculnya TI (Tambang Inkonvensional) di Kabupaten Kutai Kartanegara, awalnya dipicu oleh turunnya harga timah di pasar dunia hingga di bawah 4.000 dollas AS pada September 2001. Jatuhnya harga ini mengakibatkan PT. Timah merugi sehingga potensi cebakan (galian tambang) timah darat pada wilayah PT. Timah yang dianggap tak ekonomis jika dikerjakan sendiri dengan diborongkan penambangannya kepada kontraktor lokal (tambangan karya/TK). Krisis moneter 1997 yang dibarengi dengan jatuhnya harga berbagai komoditas unggulan lokal, seperti kelapa sawit, lada dan karet, juga memaksa masyarakat petani beralih ke kegiatan yang dianggap akan lebih mampu menopang keberlanjutan hidupnya, terutama dengan terjun ke tambang inkonvensional.³

² "Komisi I Tinjau Aliran Limbah Tambang JMB", Diakses tanggal 10 Oktober 2012, Dalam <http://www.dprdkutaikartanegara.go.id/bacawarta.php?id=1709>.

³ Kompas, Sabtu, 14 Oktober 2006.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai suatu wilayah yang kaya akan bahan tambang membawa permasalahan tersendiri bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat banyak yang melakukan penambangan secara liar dalam arti menggunakan tanah yang dimilikinya untuk melakukan penambangan. Setelah hasil tambang pada tanah tersebut habis, maka masyarakat biasanya meninggalkannya begitu saja tanpa melakukan perbaikan, akibatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara banyak terdapat area bekas penambangan, serta rusaknya kelestarian alam. Penambangan secara liar dan tidak memperhatikan kelestarian alam tersebut mendapat perhatian dari pemerintah karena apabila terus berlanjut dapat membawa dampak yang lebih besar pada rusaknya ekosistem di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan berbagai upaya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan membuat kawasan pertambangan sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada.

Tabang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak Kenyah ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.425 jiwa (2012) yang tersebar di 18 desa. Dengan luas wilayah mencapai 7.764,50 km², Kecamatan Tabang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus kecamatan terjauh dan cukup sulit dijangkau karena transportasinya

Di Kecamatan Tabang terdapat cadangan emas yang cukup potensial untuk dieksploitasi terutama di sekitar Sungai Belayan. Hingga kini belum ada investor yang mengelola areal bahan galian tersebut, keadaan ini justru dimanfaatkan oleh penambang emas ilegal untuk mencari emas di aliran sungai belayan yang dapat merusak lingkungan.⁴

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Perda No.2 Tahun 2001 tentang ijin usaha pertambangan umum daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang penambang di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 5 Oktober 2012, diketahui bahwa terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi perda tersebut. Menurut Hardy, masih banyak penambangan liar di Kabupaten Kutai Kartanegara.⁵ Hal serupa juga dikemukakan oleh Ridwan yang menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kurang memberi sanksi yang tegas sehingga banyak penambangan liar terjadi.⁶

Kondisi di atas menjadi permasalahan yang layak untuk diteliti sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2012 (Study Kasus tentang Pertambangan Ilegal di Kecamatan Tabang)".

⁴ "Tabang, Kutai Kartanegara", Diakses tanggal 10 Oktober 2012, Dalam <http://km.ristek.go.id/assets/files/330.pdf>.

⁵ Hardy, Penambang di wilayah Tenggarong Seberang, Wawancara Tanggal 5 Oktober 2012.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan ijin usaha pertambangan umum daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2012 ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi maraknya pertambangan ilegal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ijin usaha pertambangan umum daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2012 dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi maraknya pertambangan ilegal. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi tentang bagaimana implementasi kebijakan ijin usaha pertambangan umum daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2012.
2. Memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pertambangan ilegal.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian Kebijakan

Setiap pemerintahan tidak akan dapat lepas dari pembuatan kebijakan. Kebijakan merupakan hal yang penting karena dengan adanya kebijakanlah maka masyarakat dan pembangunan dapat diatur. Menurut Miftah Thoha, dalam arti luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain:

- a. *Policy* merupakan praktis sosial, *policy* bukan even yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh, baik untuk mendamaikan "*claim*" dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan "*insentif*" bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Berdasarkan dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* pada satu pihak dapat terbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.⁷

Adanya beberapa pengertian kebijakan diatas dan dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu harus mengabdikan bagi kepentingan rakyat

⁷ Mifta Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, Hal.57-58.

banyak atau masyarakat, maka dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kebijakan adalah:

“Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat”.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Charles O.Jones mengimplementasikan kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperhatikan hasilnya. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan, *kamus Websteri* merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan) menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).⁸

Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah executive atau dekrit presiden).

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari

semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intend*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).⁹

Implementasi dapat pula dilihat dari sudut kelompok sasaran, misalnya antara manusia dan lingkungan dalam program usaha melestarikan kualitas lingkungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan baru yang dapat dilakukan apabila telah dapat disusun rencana pengelolaan lingkungan untuk menghindarkan dari rusaknya lingkungan.¹⁰ Kelompok sasaran itu kemungkinan akan lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan apakah pelayan atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan aktivitas pengelolaan pertambangan dalam mengatasi permasalahan pencemaran lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemahaman yang mendalam terhadap sasaran ini amat penting artinya bagi peraturan pemerintah, pemahaman semacam itu akan memungkinkan mereka untuk mengantisipasi umpan balik (*political feedback*) dan peka terhadap asumsi-asumsi perilaku (*behavioral assumption*) yang mendasari penyusunan setiap program. Sebaliknya, peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak dalam tahap merancang bangun kebijakan (*the policy design stage*) tersebut telah dipikirkan masak-masak berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

⁹ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, Hal.5.

¹⁰ Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, Hal.9.

Mazmania dan Sabatian telah merumuskan proses implementasi kebijakan ini dengan lebih rinci:

“implementasi adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan executive yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan mengatur proses implementasinya”.¹¹

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu. Biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang di kehendaki atau tidak dari output tersebut. Dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.¹²

a. Analisis Implementasi Kebijakan

- 1) Pada awalnya adalah kebijakan publik, kebijakan publik ini kemudian diterjemahkan kedalam program-program nyata yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan kedalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan publik, menjadi hasil

¹¹ Chafid Fandeli, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pemananannya dalam Pembangunan*, Liberty, Yogyakarta 1995, Hal.21.

yang bisa dilihat. Implementasi kebijakan publik disini merupakan fungsi dari implementasi program dan yang tergantung pada hasil itu sendiri. Studi implementasi kebijakan publik merupakan usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dalam usaha untuk memahami pelaksanaan kebijakan publik tersebut perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pelaksanaan implementasi kebijakan publik. Kebijakan publik banyak ditentukan oleh aparat pelaksana dalam birokrasi namun demikian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sesungguhnya juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar birokrasi namun demikian, disamping dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksana implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh isi atau muatan kehidupan publik itu sendiri dan konteks politik atau karakter rezim serta sistem politik yang ada. Seperti yang dicontohkan oleh berbagai Negara, dimana penerapan suatu kebijakan publik gagal karena isi kebijakan yang kurang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak. Disamping itu juga kegagalan tersebut dikarenakan konteks politik yang ada yang cenderung mementingkan sekelompok orang atau elit ditingkat kekuasaan untuk mengambil keuntungan ekonomi atau

implementasi kebijakan publik banyak dipengaruhi oleh isi (content), kebijakan itu sendiri dan kinerja birokrasi dalam sistem politik.¹³

- 2) Metode pendekatan dan penelitian kinerja kebijakan implementasi ini merujuk kepada pemikiran Paul A Sabatier, yaitu:

“Penelitian dimulai dari suatu keputusan kebijakan pemerintah dan serangkaian kebijakan pemerintah pusat diambil oleh para pejabat”.

Penelitian ini bermula dari keputusan kebijakan publik yang telah diambil oleh para pejabat yang berwenang kemudian menanyakan prosedur pelaksanaan dampak kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan itu dengan kontribusi pengalaman lapangan pelaksanaan kebijaksanaan bagi reformulasi kebijakan tersebut. Analisis kebijaksanaan adalah penilaian dari proses kebijakan yang berkaitan dengan dua hal yaitu, pertama isi kebijakan dan yang kedua lingkungan atas sistem politik yang ada.¹⁴

- b. Model-model implementasi kebijakan negara

Sekalipun dalam khasanah ilmu kebijakan negara atau analisis kebijakan negara telah banyak dikembangkan model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijakan, namun beberapa model implementasi kebijakan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran atau tulisan para ahli.

- 1) Menurut Hogwood dan Gounn untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka

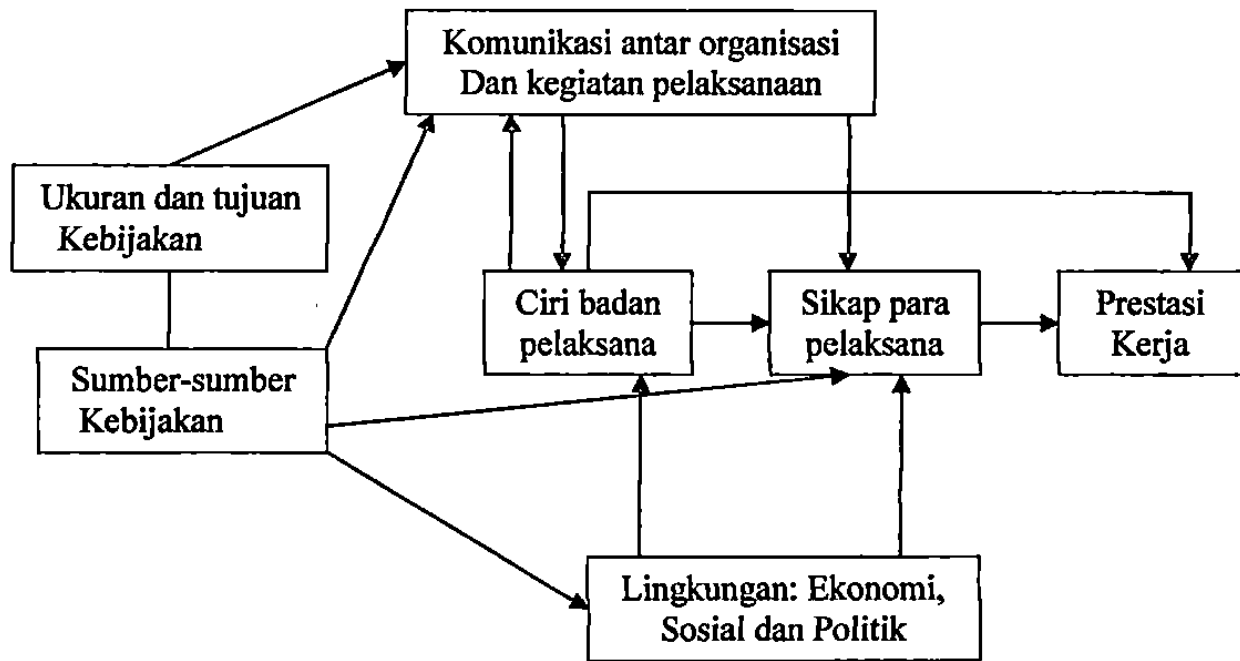
¹³ *Ibid*, Hal.80.

¹⁴ Ulung Pribadi, *Implementasi Kebijakan Kesehatan, Program Bidan Desa, Program Pasca Sarjana USM*, 1998, Hal.8.

diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
 - b) Untuk pelaksanaan program tersebut tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup mandiri.
 - c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
 - d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
 - e) Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
 - f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
 - g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
 - h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
 - i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 - j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.¹⁵
- 2) Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan- perbedaan dalam proses implementasi

Gambar 1.1 Model Proses Implementasi



Sumber: D.S Van Meter and Van Horn, *The Policy Implementation Process: A conceptual Framework*, *Administrasi and Society*, 1975, hal. 445- 448.

Gambar struktur atau pola kerja diatas menjelaskan tentang sistem atau proses dimana implementasi dirancang dan diterapkan pada tingkatan teknis dilapangan. Secara deskriptif komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan merupakan ciri dari badan pelaksana dimana dapat dijadikan sebagai ukuran kebijakan yang merupakan sebagai sumber-sumber kebijakan, atau sebaliknya setelah melalui sebuah tahapan atau kajian komunikasi antar organisasi dari kegiatan pelaksanaan dapat juga sebagai ciri badan pelaksana setelah menerima masukan, dan merupakan sebagai salah satu sikap pelaksana, yang akhirnya menjadi sebuah prestasi kerja, dalam pola

para pelaksana, dan prestasi kerja, adapun tanpa melalui sikap para pelaksana dalam menerapkan kebijakan ciri badan pelaksana dapat langsung dikatakan prestasi kerja, semua ini tidak terlepas masukan sektor lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik yang merupakan sumber-sumber dari kebijakan dan dapat dikatakan sebagai sikap para pelaksana setelah menganalisa semua permasalahan yang timbul dan terjadi. Kurangnya efektifnya perda yang ada, minimnya komunikasi antar pemerintah, serta kurangnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah dapat menyebabkan kebijakan menjadi kurang berhasil.

3) Model yang dikembangkan oleh **Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier**, yang disebut *A Frame Work For Implementation Analysis* (kerangka kerja untuk implementasi Analisis), kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan Negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.¹⁶

Dari ketiga model-model implementasi diatas yang sering digunakan adalah yang model yang dikembangkan oleh Daniel karena dalam proses implementasinya mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasinya beserta faktor-faktor yang akan mendukung dalam pelaksanaannya.¹⁷

¹⁶ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi dan Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Hal.59-82.

¹⁷ *Ibid.*

Suatu implementasi tentunya mempunyai tujuan untuk memperoleh keberhasilan, tercapainya atau tidaknya suatu tujuan dari implementasi suatu program itu sangat tergantung bagaimana adanya faktor-faktor pendukung. Faktor-faktor pendukung itu ada yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Faktor-faktor pendukung itu adalah:¹⁸

- (a) Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- (b) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai
- (c) Hubungan ketergantungan harus kecil
- (d) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- (e) Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- (f) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- (g) Kebijakan yang akan diimplementasikan di dasari oleh suatu kualitas yang handal.

Implementasi kebijakan yang operasionalnya adalah program, dalam prosesnya terdapat tiga unsur pendukung yang penting dan mutlak yaitu adanya: (1) Program yang dilaksanakan, (2) target group, yaitu kelompok yang menjadi sasaran penerima manfaat program dan (3) unsur pelaksana, yaitu organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan proses implementasi tersebut.¹⁹

Setiap implementasi dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu kebijakan

¹⁸ Abdul M Syukur, *Perkembangan Penerapan Studi Implementasi*, Pusdiklat Pegawai Negeri RI,

dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat.

Efisiensi pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan keseimbangan antara biaya atau dana yang dikeluarkan, waktu pelaksanaan, sumber daya manusia yang digunakan dan kualitas pelaksanaan kebijakan. Keputusan kelompok sasaran inilah yang memberikan nilai arti pada pelaksanaan program karena kelompok sasaran inilah yang terkena dampak langsung dari program yang dilaksanakan. Kebijakan dikatakan berhasil apabila tujuan dapat tercapai.

Tetapi terkadang proses pelaksanaan suatu kebijakan itu tidak selalu mencapai keberhasilan dan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakan dan sering timbul semacam pertanyaan tentang sebab-sebab timbulnya kegagalan tersebut. Kegagalan dari pelaksanaan kebijakan itu dan sangkut pautnya dengan isi kebijakan yang harus dilaksanakan serta pembagian potensi yang ada.

Isi kebijakan yang menyebabkan kegagalan dari suatu pelaksana kebijakan terjadi karena samar-samarnya isi dari kebijakan, dalam arti tujuan-tujuan tidak terperinci. Hal ini akan mengakibatkan kurangnya pegangan bagi pelaksana, yang akan memperbesar kemungkinan perbedaan pandangan dari isi kebijakan.

Selain itu kebijakan yang hendak dijalankan ada kalanya bertentangan dengan kebijakan yang lain. Yang merupakan salah satu sebab dari suatu pelaksanaan kebijakan yang tidak berhasil, yaitu terletak pada kurangnya

Mengenai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembagian potensi di antara aktor-aktor yang terlibat, struktur dari organisasi pelaksana dapat juga mengakibatkan masalah. Hal ini terjadi apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Amir Santoso mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn tentang variabel-variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan hasilnya. Variabel-variabel tersebut adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, aktivitas komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, karakteristik dari agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi dari pelaksana dan penyelenggaranya.²⁰

Menurut Edward dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor yang memungkinkan tujuan dan maksud pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tercapai. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :²¹

a. Komunikasi

Tersedianya komunikasi adalah berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan kebijakan terutama bagi aparat pelaksana sehingga akan diketahui apa yang harus dilaksanakan. Pada faktor komunikasi terdapat tiga aspek pokok, yaitu: transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

(1) Transmisi (*Transmission*):

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan surat perintah telah dikeluarkan. Namun ada beberapa hambatan yang mungkin timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi tersebut:

- i) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan (*Disagreement of Implementers*).
- ii) Distorsi yang ditimbulkan karena informasi melalui banyak lapisan hirarki.
- iii) Birokrasi (*Distortion may arise as information passes through multiple layers of the bureaucratic hierarchy*).
- iv) Penangkapan komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan (*Implementers selective perception and disinclination to know about a policy's requirements*).

(2) Kejelasan (*Clarity*)

Jika kebijakan-kebijakan akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus

terdapat enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu:

- i) *Complexity of public policies* (kompleksitas kebijakan publik).
- ii) *The desire not to irritate segments of the public* (Keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok dalam masyarakat).
- iii) *Lack of consensus on the goals of a policy* (Kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan).
- iv) *The problems in a starting up a new policy* (Masalah-masalah dalam memulai kebijakan baru).
- v) *Avoiding accountability for policies* (Menghindari akuntabilitas kebijakan).
- vi) *The nature of judicial decision making* (Hakekat pembuatan keputusan judicial).

(3) *Konsistensi (Consistency)*

Untuk mengimplementasi kebijakan secara efektif, maka pemerintah-pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Dari beberapa faktor yang menghasilkan komunikasi yang tidak jelas, juga menyebabkan komunikasi yang tidak konsisten, antara lain:

- i) Kompleksitas kebijakan publik.
- ii) Kesulitan-kesulitan untuk memulai program baru.

iii) Derajatnya timbul dari berbagai kebijakan

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan dana atau intensif lain yang akan mengefektifkan pelaksanaan kebijakan. Sumberdaya yang penting untuk implementasi kebijakan meliputi staf dengan jumlah yang sesuai dan dengan keahlian yang memadai dan relevan dengan implementasi kebijakan, kewenangan dan fasilitas.

- i) Staf (*Staffs*). Jumlah staf yang mencukupi dan memiliki *skill* yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas.
- ii) Informasi (*Information*). Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu:
 - 1) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, implementor perlu mengetahui apa yang dilakukan;
 - 2) Data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak.
- iii) Wewenang (*Authority*). Wewenang akan berbeda-beda dari satu program ke program lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti misalnya: hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang ke pengadilan, mengeluarkan perintah kepada pejabat lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan

iv) Fasilitas-fasilitas (*Facilities*). Fasilitas-fasilitas meliputi bangunan (*buildings*), perlengkapan (*equipment*) dan perbekalan (*supplies*).

c. Disposisi/sikap pelaksana

Sikap pelaksana yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu proyek. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian juga sebelumnya apabila sikap-sikap dan perspektif implementor berbeda dari pembuatan keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Edwards III dalam kaitannya dengan hal ini mengatakan:

*“If implementers are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decision makers intended. But when implementers’ attitudes or perspectives differ from the decision makers the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated”.*²²

Beberapa kebijakan masuk ke dalam *Zone of Indifference* dari para administrator. Kebijakan-kebijakan tersebut mungkin merupakan konflik dengan pandangan kebijakan substansi implementor atau kepentingan pribadi/ organisasinya. Dalam hal inilah disposisi menimbulkan hambatan implementasi.

“Some policies fall within the “zone of indifference” of administrators. Others elicit strong feelings. These policies may conflict with implementers’ substantive policy view or their personal or organizational interest. It is here that disposition nose

Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi kebijakan bila implementor benar-benar tak setuju dengan substansi suatu kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menanggukkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setuju untuk meningkatkan kemungkinan-kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

"Disposition may hinder implementation when implementers simply disagree with the substances of a policy and their disagreement leads them not to carry it out. Sometimes implementation is impeded by more complex situations, such as when implementers delay in implementing a policy of which they may approve in the abstract in order to increase the chances of achieving another, competing policy goal".²⁴

Unit-unit birokrasi yang berbeda mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kebijakan. Ketidaksepakatan dalam dan antara badan-badan menghalangi kerjasama dan menghambat implementasi dalam suatu bidang kebijakan. Masing-masing badan terkait mungkin memiliki prioritas-prioritas yang berbeda, komitmen yang berbeda, dan cara penanggulangan masalah yang berbeda. Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah mungkin hal yang sulit dan tidak menjamin bahwa dalam satu teknik yang potensial untuk mengatasi masalah berdasarkan para implementor adalah dengan mengubah sikon

"Another potential technique to deal with the problem of implementer's disposition is to alter the dispositions of existing implementers through the manipulation of incentives."²⁵

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan sehingga struktur birokrasi ini harus jelas. Terdapat dua hal penting dalam struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard (*Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi (*Fragmentation*).

i) *Standard Operating Procedures (SOP)*

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja baru atau tipe-tipe personal baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi. Meskipun SOP dapat menyebabkan masalah-masalah implementasi, namun SOP juga memiliki kegunaan. Organisasi dengan prosedur perencanaan yang fleksibel dan kontrol

yang memadai atas program fleksibel dapat lebih beradaptasi terhadap tanggung jawab baru daripada birokrasi tanpa karakteristik seperti ini.

ii) *Fragmentasi*

Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komisi-komisi legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Edwards menyatakan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "*Fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units*". Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Menurut Edwards, fragmentasi berimplikasi terhadap definisi tanggung jawab dan hal ini akan membuat koordinasi kebijakan menjadi sulit. Sumber-sumber dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif seringkali terdistribusi di antara banyak unit-unit birokrasi. Semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan semakin kecil peluang untuk

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijakan yang umumnya biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah *executive* atau dekrit presiden. Indikator untuk memahami implementasi kebijakan meliputi:

- a. Adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- b. Penerapan pada kelompok sasaran. Kelompok sasaran umumnya memusatkan perhatiannya pada permasalahan apakah pelayan atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan aktivitas pengelolaan pertambangan dalam mengatasi permasalahan pencemaran lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Petugas yang menjadi pengawas dilaksanakannya kebijakan.
- d. Efisiensi dan efektivitas dari tujuan dibuatnya kebijakan.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup meliputi lingkungan fisik di sekitar, atau habitat-habitat dari organisme, dan yang kaitannya dengan ekosistem baik flora dan fauna baik dikehidupan air maupun darat yang selalu berproses secara berskala untuk mempertahankan generasi maupun mempertahankan

Persoalan lingkungan mencakup dua hal, yakni pencemaran dan perusakan lingkungan (Pasal 1 butir 7 dan 8 UULH).²⁶ Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan sehingga tatanan lingkungan turun. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tindakan langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Untuk selanjutnya ini akan mencakup permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam.

Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dari kerusakan atau pencemaran lingkungan menyebabkan meningkatnya penyakit-penyakit lingkungan. Respon yang bersifat organisasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan umum tentang lingkungan hidup dan diikuti dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan serta pembentukan organisasi lingkungan hidup, baik ditingkat pusat maupun daerah.²⁷ Persoalan lingkungan hidup mencakup dua hal, yakni pencemaran dan eksploitasi.

²⁶ Ninie Suparni, *Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hal.39-40.

²⁷
²⁷
²⁷

Dalam UULH Pasal 1 butir 12 menyatakan :

“Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pembangunan dengan proyek yang dikaji dari aspek kelayakan lingkungan bisa disebut pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakekatnya dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Instrumen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Menurut Peraturan Pemerintah No.29/1986, yang memiliki satu model AMDAL mempunyai pengertian:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
2. Analisis Dampak Lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Dalam peraturan pemerintah No.51/1993 dikenal ada beberapa model AMDAL yaitu AMDAL proyek individual (seperti PP No.29/1986) AMDAL kegiatan terpadu, AMDAL kawasan, dan AMDAL regional. Pengertian ketiga AMDAL tersebut adalah:

- 1) AMDAL Kegiatan Terpadu, multi sektor adalah hasil studi

direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hampan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.

- 2) AMDAL Kawasan adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hampan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab.
- 3) AMDAL Regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hampan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi bertanggung jawab.²⁸

Pada hakekatnya pembangunan adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila sumber daya yang dimanfaatkan ini berupa sumber daya alam, maka akan berakibat perubahan sifat dan harkatnya. Tetapi bila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar. Pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu agenda pembangunan. Berbagai cara dan kebijakan dilakukan agar tetap berada pada

laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi baik melalui pemanfaatan sumber daya alam, intensifikasi penggunaan lahan maupun industrilisasi memungkinkan timbulnya dampak terhadap lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mungkin harus ditebus dengan rusaknya sumber daya alam apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara yang selama ini penopang laju pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari sumber daya alam khususnya tambang batubara, timah, emas dan bahan galian golongan C seperti kaolin dan kuarsa.

Disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dikatakan efisien dan efektif apabila mampu terhindar dari pencemaran dan pengerusakan di mana pencemaran merupakan dimasukannya makhluk hidup, zat energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hingga menurunnya tatanan lingkungan sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tindakan langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

E. Definisi Konsepsional

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu ataupun kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk

operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ijin usaha pertambangan umum daerah adalah ; Komunikasi yang merupakan sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat, Sumber daya merupakan komunitas-komunitas individu yang terlibat didalamnya, Disposisi atau sikap pelaksana yang merupakan salah satu aktor dari indikator suatu tujuan dan Struktur Birokrasi adalah hirarki yang mengatur tata kelola dalam implementasi Perda.

F. Definisi Operasional

1. Komunikasi

- a. Transmisi (*transmission*).
- b. Kejelasan (*clarity*).
- c. Konsistensi (*consistency*).

2. Sumber Daya

- a. Staf (*staffs*).
- b. Informasi (*information*).
- c. Wewenang (*authority*).

3. Disposisi/sikap pelaksana

- a. Melaksanakan kebijakan sebagaimana seharusnya

b. Tidak memperhatikan kepentingan pribadi atau golongan tertentu

- a. Prosedur-prosedur kerja standard (*Standard Operating Procedures*).
- b. Fragmentasi (*Fragmentation*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan yang bersifat kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu satuan kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa.²⁹

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tetap sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Adapun penjelasan yang bersifat kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang disusun ke dalam suatu teks yang diperluas dan bukan rangkaian angka.³⁰

2. Unit Analisis

Di dalam melakukan penelitian penulis memilih pada Kecamatan Tabang yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dipilihnya kecamatan ini karena Kecamatan Tabang terdapat cadangan emas yang cukup potensial untuk dieksploitasi terutama di sekitar Sungai Belayan, dan belum ada investor yang mengelola areal

²⁹ Nasir Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.63.

³⁰ Nasir Mohammad, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hal.15.

bahan galian tersebut, sehingga saat ini dimanfaatkan oleh penambang emas ilegal untuk mencari emas di aliran Sungai Belayan.

Selain itu pemilihan lokasi karena disebabkan fenomena yang ada cukup memprihatinkan dan masalah ini tidak dapat dipecahkan hanya dari kacamata seorang ahli ekologi saja ataupun ahli lainnya, namun dari satu keseluruhan yang bulat. Sebagai masalah bersama umat manusia karena hidup mungkin tergantung satu dengan yang lain. Kecamatan Tabang saat ini adalah kecamatan yang paling banyak penambang ilegalnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang kompeten atau terkait dengan masalah yang ada, dalam penelitian ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah Dinas Pertambangan dan Energi, serta BAPEDALDA. Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan menjadi sumber data primer akan diwawancarai secara mendalam guna mendapatkan data-data tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data primer yang didapat. Data sekunder berupa buku pedoman dan arsip-arsip yang berkenaan dengan upaya pemerintah

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik meliputi:

a. Wawancara

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi secara lisan dari pada informan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara awal dengan keseluruhan informan, dari wawancara awal dapat dijadikan landasan untuk kemudian melakukan secara luas dan mendalam mengenai segala sesuatu informasi dengan mengajukan tanya jawab atau percakapan secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan sebagai panduan kepada informan.

b. Observasi

Teknik observasi ini dipergunakan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian, sejarahnya, keadaan penduduk dan pendapatnya tentang pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan teknik ini adalah dengan cara penelitian turun langsung ke dalam lingkungan subyek untuk membuat catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistematis.

c. Dokumentasi

Melalui teknik ini mempelajari berbagai sumber data melalui laporan hasil penelitian, catatan, buku, agenda, surat kabar dan majalah. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran ilmiah secara umum sebagai landasan berpijak dalam menganalisa data dan menjawab permasalahan yang diajukan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dan melakukan penelitian peneliti menggunakan analisa kualitatif. Pada penelitian kualitatif tidak perlu mencari sebab-akibat, tetapi berupaya memahami masalah atau menyimpulkan dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. Dalam hal ini situasinya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Data diperoleh dari catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya untuk memperoleh keabsahan data penelitian di dalam hal ini yang berperan adalah Bapedalda, Bupati, Dinas Pertambangan dan Energi sebagai badan usaha. Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut: (a) data-data yang ada berdasarkan hasil wawancara dikumpulkan; (b) dilakukan triangulasi data; (c) hasil seluruh wawancara dipilah-pilah sesuai indikator penelitian yang telah ditetapkan; (d) data diklasifikasi dan dibandingkan dengan teori yang ada.